



## INKLUSI – Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif *Tidak Ada Satu Pun yang Tertinggal*



Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif, atau INKLUSI, adalah program kemitraan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama delapan tahun, dari 2021 hingga 2029, dengan total anggaran hingga AUD 120 juta.



Program ini mendorong partisipasi kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik, serta memastikan mereka memperoleh manfaat yang lebih setara dari hasil pembangunan.



INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Dukungan ini sejalan dengan agenda pembangunan Indonesia dan upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

### MENJANGKAU KELOMPOK YANG TERPINGGIRKAN DI SELURUH INDONESIA



**32**

PROVINSI

LEBIH DARI

**100**

KABUPATEN/  
KOTA

LEBIH DARI

**600**

DESA

## SASARAN

Lebih banyak masyarakat marginal berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari keputusan pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia.

## TUJUAN

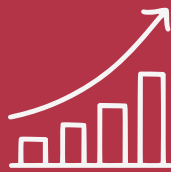
Memperkuat kontribusi masyarakat sipil, dalam kemitraan dengan pemerintah, untuk mendorong kesetaraan gender, pemenuhan hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial bagi kelompok masyarakat marginal.

## FOKUS PILAR



### PILAR SOSIAL BUDAYA

Akses ke layanan dan perlindungan dari kekerasan



### PILAR EKONOMI

Pemulihan ekonomi dan penghidupan



### PILAR POLITIK

Partisipasi inklusif dalam pembangunan

## PRIORITAS UTAMA

INKLUSI bermitra dengan organisasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk memperluas ruang partisipasi kelompok terpinggirkan dalam proses pembangunan yang memengaruhi kehidupan mereka. Secara khusus, INKLUSI berfokus pada empat prioritas:

### Akses ke Layanan Dasar



Penguatan layanan dan sistem yang inklusif bagi kelompok rentan melalui perlindungan sosial adaptif, peningkatan layanan disabilitas, pengembangan layanan kesehatan inklusif, serta perluasan akses pendidikan inklusif yang setara dan berkualitas.

### Perlindungan dari Kekerasan



Penguatan pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak, termasuk upaya pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Prioritas ini juga mencakup penguatan sistem dan layanan untuk mencegah serta menangani kekerasan terhadap anak secara lebih terpadu dan responsif.

### Pemulihan Ekonomi dan Mata Pencaharian



Penguatan pemulihan ekonomi dan mata pencaharian yang inklusif melalui optimalisasi peran ULD Ketenagakerjaan, peningkatan kebijakan dan tata kelola ketenagakerjaan, perluasan akses ekonomi bagi kelompok rentan, serta penguatan koperasi dan lembaga perekonomian.

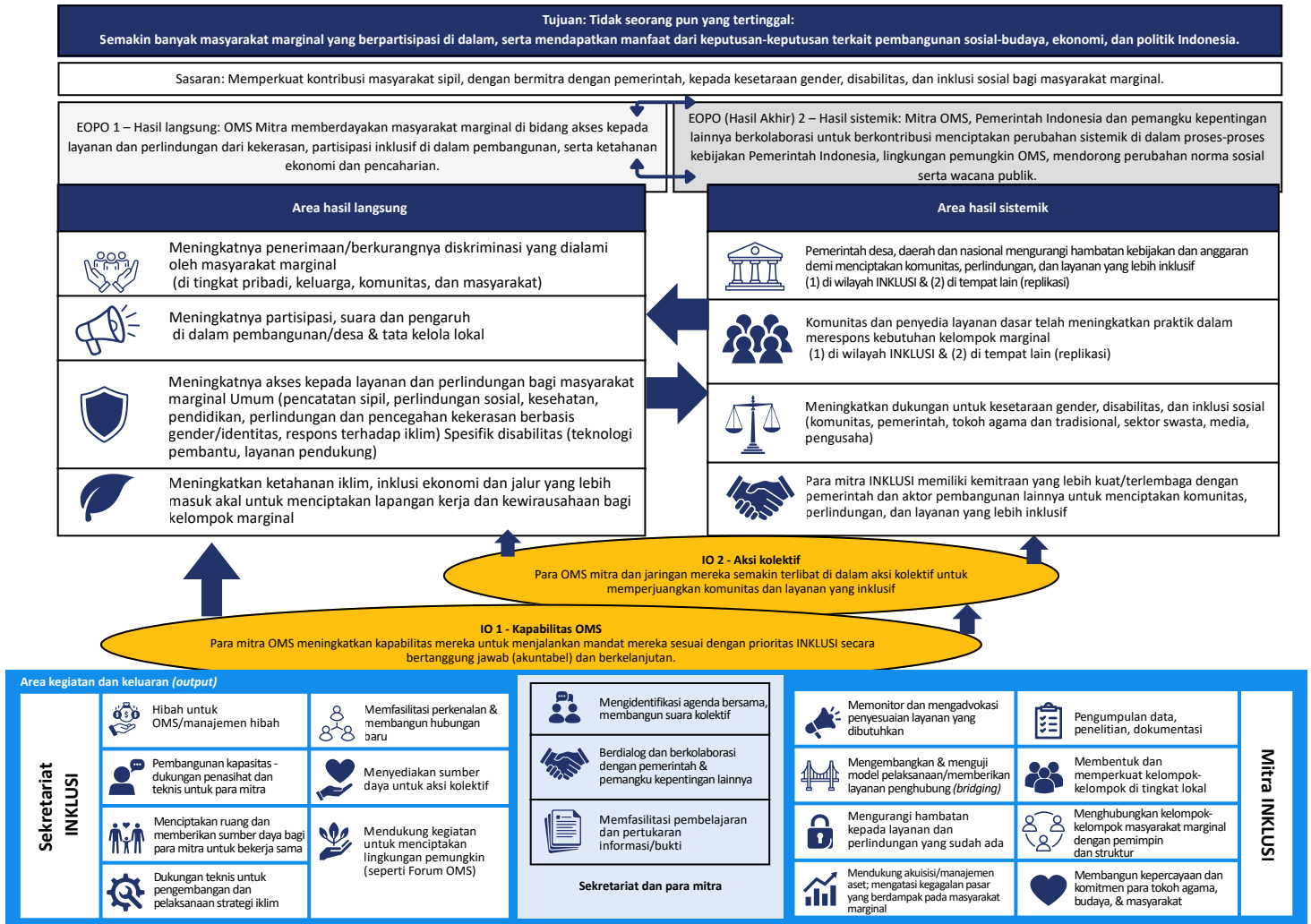
### Partisipasi Inklusif dalam Pembangunan



Penguatan partisipasi inklusif dalam pembangunan melalui tata kelola yang lebih inklusif, advokasi kebijakan dan perencanaan di tingkat nasional dan daerah, praktik inklusif di tingkat desa, serta peningkatan perlindungan dan partisipasi kelompok rentan.

## MEMASTIKAN TIDAK ADA SEORANG PUN YANG TERTINGGAL

INKLUSI menerjemahkan prinsip “tidak ada seorang pun yang tertinggal” ke dalam kerja bersama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas. Pendekatan ini menempatkan kelompok terpinggirkan bukan hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki suara, pengalaman, dan pengetahuan dalam proses pembangunan.



## MEMPERKUAT ADVOKASI DAERAH HINGGA NASIONAL

INKLUSI memperkuat kemampuan mitra organisasi masyarakat sipil dan jaringan daerah untuk membawa pengetahuan dari tingkat akar rumput ke proses pengambilan keputusan di tingkat daerah dan nasional. Melalui dukungan hibah dan pendampingan teknis, mitra INKLUSI melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain:



Mitra INKLUSI memanfaatkan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk melakukan aksi kolektif dan advokasi di tingkat nasional. Melalui dialog strategis dan kerja sama dengan pemerintah, parlemen, serta sektor swasta, INKLUSI mendukung penguatan kapasitas mitra dalam kesetaraan gender, disabilitas dan inklusi sosial, tata kelola hibah, pemantauan dan evaluasi, advokasi, komunikasi, pemberdayaan ekonomi, dan keberlanjutan organisasi.

## MITRA INKLUSI MENDUKUNG KEBIJAKAN NASIONAL DAN DAERAH

### ▶ Integrasi GEDSI dan penguatan kebijakan pembangunan

Mitra INKLUSI memperkuat integrasi GEDSI dalam rencana pembangunan Indonesia, termasuk RPJMN, RPJMD, dan RKPD, melalui Musnas Perempuan, dukungan data dan teknis, musrenbang inklusif, serta penyusunan agenda kebijakan GEDSI untuk RPJPN 2025–2045.

### ▶ Inklusi sosial dan layanan dasar (disabilitas, kesehatan, lansia)

Mitra INKLUSI mendorong inklusi disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik melalui rencana aksi nasional dan daerah, termasuk RAN/RAD PD, indikator Desa Inklusif, metodologi pendidikan inklusif, layanan kesehatan inklusif, SOP Puskesmas, serta model layanan lansia terintegrasi.

### ▶ Pelindungan kelompok rentan (perempuan, anak, dan korban kekerasan)

Mitra INKLUSI mendukung STRANAS PPA melalui data, kebijakan, dan layanan, serta memperkuat implementasi UU TPKS melalui pengetahuan UPTD PPA, Satgas PPKS, pesantren ramah anak, dan penguatan LPKA. Mitra juga mengembangkan model pemberdayaan perempuan yang diadopsi dalam kebijakan nasional dan daerah.

### ▶ Pelindungan pekerja migran dan pencegahan TPPO

Mitra INKLUSI mendorong penguatan kebijakan pelindungan pekerja migran melalui advokasi global, rekomendasi regulasi, dukungan teknis pelatihan prakeberangkatan, serta kontribusi terhadap revisi UU TPPO.

### ▶ Demokrasi inklusif dan hak masyarakat adat

Mitra INKLUSI mendorong pemilu inklusif melalui alat pemantauan disabilitas dan masukan kepada Bawaslu, serta mendukung penyusunan peta jalan masyarakat adat bersama pemerintah.

### ▶ Penguatan ekosistem masyarakat sipil

INKLUSI mendukung inisiatif yang memastikan adanya ruang bagi suara dan partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam pembangunan Indonesia.

## MITRA INKLUSI



(Hanya fase 1)



## LEAVE NO ONE BEHIND

*Tidak Ada Satupun yang Tertinggal*

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, atau INKLUSI, berupaya meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok terpinggirkan dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta memastikan mereka memperoleh manfaat yang lebih setara dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk mendorong kesetaraan gender, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Program ini mendukung agenda Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, sejalan dengan rencana pembangunan nasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. INKLUSI merupakan program kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia yang berlangsung selama delapan tahun (2021–2029), dengan anggaran hingga AUD 120 juta. Pada Fase 2 (2026–2029), program ini bekerja dengan 10 organisasi masyarakat sipil nasional Indonesia beserta jaringan mereka yang tersebar di 32 provinsi, >100 kabupaten/kota, dan >600 desa.

**INKLUSI**  
Kemitraan Australia - Indonesia  
Menuju Masyarakat Inklusif